

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

- Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 08
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 17 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Hapsem BPK) Semester II Tahun Anggaran 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019, Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020, dan isu-isu aktual bidang pertanian
Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 39 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, MS. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian/Plt. Sekretaris Jenderal);
3. Justan Ridwan Siahaan, AK.MACC,CA. (Inspektur Jenderal);
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Hortikultura);
5. Drh. I Ketut Diarmita, MP. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
6. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan);
7. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian);
8. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan); dan
9. Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian membahas tindak lanjut Hapsem BPK Semester II TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019, Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020, dan isu-isu aktual bidang pertanian, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dibuka pukul 11.30 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas prestasi pencapaian kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (Hapsem) BPK Semester II Tahun 2018 dan meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan keseluruhan Hapsem BPK Tahun 2018.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi APBN Kementerian Pertanian Tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp4.712.867.577.577,00 atau 21,71% dari Pagu APBN Tahun 2019 sebesar Rp21.710.906.328.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian lebih meningkatkan realisasi anggaran melalui pelaksanaan program-program prioritas dengan baik.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif APBN Kementerian Pertanian dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020 sebesar Rp20.535.309.526.000,-, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.861.679.046.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp90.328.596.000,00;
 - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp5.962.808.824.000,00;
 - d. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp992.601.627.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.125.816.437.000,00;
 - f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.022.297.255.000,00;
 - g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp3.403.898.216.000,00;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1.790.970.429.000,00;
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp1.625.617.131.000,00;
 - j. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp663.563.546.000,00; dan
 - k. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp995.728.419.000,00.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Pertanian akan melakukan pendalaman untuk membahas berdasarkan program dan kegiatan secara lebih detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Komisi IV DPR RI menerima usulan tambahan anggaran pada RKA-K/L dan RKP-K/L Kementerian Pertanian Tahun 2020 sebesar Rp12.046.829.790.000,00 yang dialokasikan untuk program per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp2.825.760.000.000,00;
 - b. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp960.416.000.000,00;
 - c. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.690.785.059.000,00;
 - d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.432.237.733.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp4.337.691.054.000,00;
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp32.000.000.000,00;
 - g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp737.242.944.000,00; dan
 - h. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp30.697.000.000,00.Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran dimaksud di Badan Anggaran DPR RI.
6. Komisi IV DPR RI menerima usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada RAPBN Tahun 2020 sebesar Rp2.208.500.000.000,00 yang dialokasikan untuk DAK Provinsi sebesar Rp571.000.000.000,00 dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp1.637.500.000.000,00.
7. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas usulan Pagu Subsidi Pupuk pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp34.481.596.875.000,00 atau setara 9.825.000 ton yaitu pupuk urea sebesar 4.300.000 ton, SP36 sebesar 900.000 ton, ZA sebesar 1.050.000 ton, NPK sebesar 2.800.000 ton dan organik sebesar 775.000 ton.
8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp15.531.193.602.211,00 yaitu kurang bayar tahun 2015 sebesar Rp5.045.329.128.458,00, tahun 2016 sebesar Rp2.939.751.206.345,00, tahun 2017 sebesar Rp1.833.249.604.468,00 dan tahun 2018 (*unaudited*) sebesar Rp5.712.863.662.940,00.
9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur lahan pertanian akibat bencana banjir di beberapa wilayah diantaranya di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dan beberapa daerah lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Edhy Prabowo, MM., MBA.
A-335

